

PENYELESAIAN TOL MANADO-BITUNG MUNDUR

Pemprov Sulut Ajukan Lima Megaproyek

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengajukan lima megaproyek kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Sulut.

“Megaproyek yang bisa menjadi pemicu pembangunan Sulut adalah jalan tol Manado-Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, International Hub Port (IHP) Bitung, perluasan Bandara Sam Ratulangi, dan pembangunan Coral Triangle Initiative (CTI) yang hampir rampung,” kata Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang saat puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), di Ballroom Grand Kawana International City (GKIC), Manado, Senin (11/2).

Sarundajang menjelaskan, jalan tol Manado-Bitung sudah ditender pada 2013, dan saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. Sedangkan, untuk proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 2.000 hektare (ha).

“KEK Bitung ini akan lebih difokuskan untuk pengembangan industri perikanan,” ujar dia.

Upaya menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional (IHP), kata Sarundajang, bukan hanya bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah. Tetapi dengan status tersebut, pelabuhan diharapkan dapat diinterkoneksi dengan pelabuhan di negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Guna menyiapkan Sulut sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik, fasilitas Bandara Sam Ratulangi juga dibenahi dengan memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 3.000 meter.

Pembangunan daerah perbatasan, kata Sarundajang, harus dipacu, karena Sulut memiliki lebih 300 pulau dengan tiga kabupaten kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Sedangkan gedung CTI, kata Sarundajang, akan menjadi salah satu gedung di Indonesia yang di dalamnya berkantor perwakilan enam negara. Itu akan menjadi salah satu pendorong perkembangan perekonomian Sulut.

Mundur

Sementara itu, penyelesaian proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung tahap II mundur dari target akhir tahun lalu, karena proses pembebasan lahan baru mencapai 25%. Jalan bebas hambatan itu diharapkan tuntas pada akhir 2013.

“Proyek ini seharusnya sudah selesai 100% pada tahun lalu. Tetapi sekarang tahap pengerjaannya baru 37% karena masalah pembebasan tanah,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam keterangan resmi yang diperoleh *Investor Daily*, Senin (11/2).

Akibat keterlambatan pembebasan lahan, Djoko belum mau memberikan persetujuan untuk memulai pembangunan jalan tol secara resmi, meski proyek itu sudah diprogramkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Djoko menambahkan, investor yang tertarik untuk menggarap jalan tol yang menghubungkan Kota Manado dan Pelabuhan Bitung tersebut cukup banyak jika pembebasan tanah sudah tuntas. “Pembebasan lahan tidak perlu sampai 100%, tapi tunjukkan, misalnya kalau sekarang sudah bebas 25%, tahun 2013 tanah yang sudah bebas mencapai 50%,” papar dia.

Di sisi lain, pembangunan Jalan Manado Bypass tahap II yang menghubungkan Maumbi-Buha sepanjang 7,9 kilometer saat ini dibangun dengan biaya sebesar Rp 91,8 miliar. Dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta pinjaman dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan.

Pembangunan Manado Bypass tahap II akan melengkapi Manado Bypass tahap I Winangun-Maumbi yang telah selesai dibangun dan beroperasi sejak 2008. Pembangunan jalan Manado Bypass ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dalam kota Manado.

Di samping itu, jalan tersebut dapat menjadi akses bagi arus lalu lintas dari luar Kota Manado menuju Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung. Tujuan lainnya adalah terjadinya penyebaran permukiman penduduk sehingga mengurangi pertumbuhan kepadatan di pusat Kota Manado. (ean)